



Media: BERNAS

Hari: Jumat

Tanggal: 16 September 2016

Halaman: 10

Media Massa : **BERNAS** Hari : **JUMBU** Tanggal : **16/09/16** Halaman : **10**

Misi Pelayanan BUMD Tak Hilang

UMBULHARJO, BERNAS – Staf Ahli Walikota Bidang Administrasi Umum, Drs Triwidyanto, menyatakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak semata-mata berorientasi bisnis tetapi juga membawa misi pelayanan kepada publik. Dengan kata lain misi pelayanan tersebut tidak boleh dihilangkan.

"Hakikat BUMD dalam bentuk perusahaan daerah tidak semata-mata hanya berorientasi bisnis melainkan ada misi pelayanan publik," ujarnya saat menerima kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara ke Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta, Kamis (15/9) kemarin, di Ruang Rapat Sadewa Balai Kota Yogyakarta.

Menurut dia, dunia usaha merupakan salah satu di antara tiga pilar utama dalam mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik. Dua pilar lainnya adalah birokrasi dan masyarakat.

Dikatakan, penyertaan modal diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta no 6 tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Yogyakarta Kepada Badan Usaha Milik Daerah. "Dalam pembentukan badan hukum BUMD, Pemkot Yogyakarta lebih mengacu pada bentuk perusahaan daerah dibandingkan perseroan terbatas (PT)," ungkapnya.

Dengan format perusahaan daerah maka akan memberikan

keleluasaan menjalankan kepentingan daerah. Hal ini karena pemerintah menjadi pemegang saham tunggal. Artinya modal seluruhnya berasal dari Pemerintah Daerah.

Terkait dengan pengelolaan, Triwidyanto mengungkapkan pengelolaan BUMD di Yogyakarta tidak dalam bentuk *holding company*.

Dan *holding company* akan efektif manakala antara satu unit bisnis dengan unit bisnis lainnya saling menguntungkan. Sementara *core* bisnis BUMD di Yogyakarta berbeda-beda dan tidak saling menguatkan.

Yogyakarta memiliki tiga BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Kota Yogyakarta yakni Perusahaan Daerah (PD) Jogjatama Vishesha selaku pengelola XT Square, perusahaan daerah air minum (PDAM) Tirtamarta dan PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Jogja.

Dalam kesempatan itu Wakil Ketua DPRD Jepara, Arif Iskandar, yang memimpin rombongan berjumlah 33 orang menyatakan, kunjungan ini dilakukan dalam rangka studi banding untuk mempelajari sistem penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dijalankan Pemkot Yogyakarta selama ini.

"Kunjungan kerja ini bertujuan untuk mempelajari tentang sistem penyertaan modal pada BUMD Kota Yogyakarta yang

nantinya kami implementasikan di Kabupaten Jepara dalam bentuk Peraturan Daerah," kata Arif Iskandar.

Arif mengaku tertarik mempelajari sistem penyertaan modal yang dilakukan di Yogyakarta. Bahkan pihaknya menilai Yogyakarta adalah rujukan Kabupaten Jepara dalam rangka mempelajari sistem pemerintahan yang baik. (*)

Amat Segera
 Segera
 Biasa

Untuk Ditanggapi
 Untuk Diketahui
 Jumpa Pers

Yogyakarta,
 Kepala

 Ttd

 In. Trihastono, S.Sos. MM

KUNJUNGAN KERJA -- Drs Triwidyanto dan Arif Iskandar bertukar cendramata usai pertemuan dalam rangka penerimaan kunjungan kerja DPRD Jepara, Kamis(15/9) di Balai Kota Yogyakarta.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005